

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN  
WILAYAH PESISIR  
(STUDI KASUS KABUPATEN PESISIR SELATAN)**

**T E S I S**

**OLEH**

**YUSVIANTY  
0821206026**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2010  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN WILAYAH  
PESISIR**

## (STUDI KASUS KABUPATEN PESISIR SELATAN)

Oleh : YUSVIANTY

(di bawah bimbingan Prof.Dr.Ir. Helmi,M.Sc dan Prof.Dr.Fashbir Noer Sidin,SE,MSP)

### ABSTRAK

Pembangunan di bidang kelautan dan perikanan menjadi sangat penting, dengan menipisnya sumberdaya alam yang ada di daratan dan melimpahnya kekayaan sumberdaya pesisir dan laut yang dimiliki Indonesia merupakan salah satu pertimbangan terjadinya pergeseran paradigma dari negara terestrial (daratan) ke negara maritim yang terjadi pada pasca reformasi. Sehingga perlukan perubahan yang mengacu pada pembangunan yang tidak hanya semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi namun dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan para pelaku pembangunan secara adil dan terpeliharanya daya dukung dan kualitas lingkungan secara seimbang untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan untuk anak cucu kita. Untuk itu perlunya suatu sistem pembangunan yang memuat 3 (tiga) dimensi pembangunan ekonomi sosial dan pembangunan lingkungan secara sekaligus. Melestarikan ekosistem esensial bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk alam. Dalam ekonomi, peranan pasar sangat dominan dalam mempertemukan permintaan konsumen dengan penawaran produsen, tetapi pasar belum mampu menanggulangi masalah sosial dan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik meneliti tentang bagaimana penjelasan ilmiah kondisi eksisting mengapa kehidupan nelayan tidak berkembang dan bagaimana perencanaan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah pesisir.

Metode Multi Dimensional Scalling (Metode MDS) merupakan pendekatan sederhana yang dapat digunakan untuk mengevaluasi status berkelanjutan perikanan melalui *comparative sustainability* perikanan berdasarkan sejumlah atribut yang mudah diskoring (Kavanag, 2001 ; Fauzi dan Anna, 2002). Metode MDS dapat dilakukan melalui teknik analisis statistik berbasis komputer dengan menggunakan perangkat lunak SPSS yang sekaligus dilakukan analisa *Laverage*, penentuan nilai *Stress* dan nilai Koefisien Determinasi ( $R^2$ ). Model yang sempurna dalam MDS ditunjukkan dengan Nilai RSQ = 1 atau 100% dan merupakan nilai yang sensitif mempengaruhi pergerakan dimensi, namun menurut Supanto (2004) nilai RSQ  $\geq$  60% sudah bisa diterima, artinya model bisa mewakili data input dengan baik. Menurut Kavanag dan Pitcher (2004), nilai stress yang dapat diperbolehkan adalah di bawah nilai 0,25 (menunjukkan hasil analisa sudah cukup baik).

Untuk melihat kondisi berkelanjutan eksisting, dilakukan analisa Multi Dimensional Scalling ke Dimensi Ekologi sebanyak 10 atribut, Dimensi Ekonomi sebanyak 9 atribut dan Dimensi Sosial Budaya sebanyak 8 atribut. Dengan hasil MDS Dimensi Ekologi 85 % dan S-Stress 0.39 %, sedangkan atribut yang sensitif adalah atribut Hasil Tangkap dengan hasil RSQ 93.6 % dan S-Stress 0.25, dan atribut Jumlah Trip Tangkap dengan hasil RSQ 94.3 % dan S-Stress 0.27. Model ini dapat diterima karena RSQ mendekati 1 atau 100 % dan S-Stress  $\leq$  0,25. Nilai RSQ Dimensi Ekonomi 95,5 % dan S-Stress 0,19 dengan analisa masing-masing atribut hanya 1 yang tidak sensitif yaitu persentase penduduk miskin dengan RSQ 85 % dan S-Stress 0,38. sehingga semua atribut pada dimensi ekonomi memiliki sensitifitas

yang mempengaruhi keberlanjutan pembangunan. Nilai MDS Dimensi Sosial Budaya dengan RSQ 98,7 % dan S-Stress 0,13., dimana semua atribut sensitif/mempengaruhi keberlanjutan pembangunan. Dari hasil analisa MDS keseluruhan dapat dikatakan dari 27 atribut yang di analisa terdapat 24 atribut yang mempengaruhi keberlanjutan pembangunan wilayah pesisir. Analisa SWOT ditujukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor untuk merumuskan strategi. Berdasarkan data faktor-faktor internal dan eksternal didapatkan skor pembobotan sebagai berikut : faktor kekuatan = 1.39 ; faktor kelemahan = 0.50 ; faktor peluang = 1.47 ; faktor ancaman = 2.84 Dari skor pembobotan di atas selanjutnya diplotkan pada gambar analisa diagram SWOT yang terdiri dari 4 kuadran. Dari perpotongan keempat garis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka didapatkan koordinat ( 0.45 ; -0.69 ) yang mana koordinat ini masuk pada kuadran II, yakni mendukung kebijakan diversifikasi, dengan W-T Strategy yang diformulasikan sebagai berikut : (1) Adanya Sustainable Plan yang aplikatif, (2) Peningkatan kemampuan nelayan dalam menggunakan teknologi perikanan, dan (3) Peremajaan terumbu karang dan mangrove.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara ekuator kepulauan yang terdiri dari 17.508 pulau, dengan panjang pantai 81.000 km, luas hutan tropis nomor 2 di dunia, dan mega keanekaragaman hayati, baik di daratan dan lautan, mempunyai potensi sosial, ekonomi, politik yang strategis di kawasan Asia Pasifik dan lingkungan dunia. Kekayaan alam tersebut dapat dioptimalisasikan pemanfaatan hasilnya secara terarah dan terencana. Pembangunan di bidang kelautan dan perikanan menjadi sangat penting, dengan menipisnya sumberdaya alam yang ada di daratan dan melimpahnya kekayaan sumberdaya pesisir dan laut yang dimiliki Indonesia merupakan salah satu pertimbangan terjadinya pergeseran paradigma dari negara terestrial (daratan) ke negara maritim yang terjadi pada pasca reformasi. Sehingga diperlukan perubahan yang mengacu pada pembangunan yang tidak hanya semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi namun dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan para pelaku pembangunan secara adil dan terpeliharanya daya dukung dan kualitas lingkungan secara seimbang untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan untuk anak cucu kita. Untuk itu perlunya suatu sistem pembangunan yang memuat 3 (tiga) dimensi pembangunan ekonomi sosial dan pembangunan lingkungan secara sekaligus. (Salim ; Sugandhy, 2007 ; 2) Melestarikan ekosistem esensial bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk alam. Dalam ekonomi, peranan pasar sangat dominan dalam mempertemukan permintaan konsumen dengan penawaran produsen, tetapi pasar belum efektif menanggulangi masalah sosial dan lingkungan. (Sugandhy,2007;4) Pasar juga gagal menangkap isyarat lingkungan,

udara bersih, suhu nyaman, pemandangan lansekap alam indah, air tawar hujan bersih, sungai jernih, tanah subur, semua itu tidak masuk dalam perhitungan pasar sehingga tidak punya harga dan karena itu tidak punya nilai biaya manfaat bagi pembangunan.

Tiga pilar pembangunan berkelanjutan sejak deklarasi Stockholm 1972 menuju Rio de Janeiro 1992, sampai dengan Rio+10 di Johannesburg 2002 menekankan perlunya koordinasi dan integrasi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan dalam setiap pembangunan nasional dengan pendekatan kependudukan, pembangunan dan lingkungan sampai dengan integrasi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan yang menjadi pertimbangan sekarang adalah bagaimana pelaksanaan untuk menintegrasikan ketiga pilar tersebut.

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai tapi dibarengi dengan masalah-masalah, seperti pengangguran, kemiskinan di pedesaan, distribusi pendapatan yang timpang, dan ketidakseimbangan struktural hal ini tercermin oleh tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu kategori sangat miskin sebanyak 4.962 KK dan kategori miskin sebanyak 33.518 KK dengan jumlah pengangguran pada tahun 2009 sebanyak 15.761 orang (9,3% dari jumlah pengangguran di Propinsi Sumatera Barat) dapat dilihat pada lampiran tabel. Sementara itu perkembangan produksi perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan untuk ikan segar selama kurun waktu 5 tahun terakhir hanya 7,20% (dapat dilihat lampiran tabel) , seharusnya hal ini tidak terjadi mengingat luas lautan dan potensi perikanan yang dimiliki. Hal ini terjadi karena pada umumnya nelayan masih menggunakan teknologi sederhana dan pola tangkap yang kurang produktif (MCRMP Pesisir Selatan).

Dalam keterkaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, terjadi kerusakan hutan mangrove, abrasi dan akresi pantai, perubahan tataguna lahan di wilayah pesisir, intrusi air laut, dan pencemaran air laut merupakan aspek penting penyebab menurunnya produksi perikanan dan kegiatan perikanan lainnya. Degradasi lingkungan di kawasan pesisir disebabkan oleh fenomena alam seperti abrasi dan akresi pantai, eksploitasi sumberdaya marine yang berlebih-lebihan, konversi lahan mangrove menjadi tambak, depresi air tanah tawar, dan tidak berkelanjutannya praktek pengelolaan lahan di daerah hulu DAS.

Rusaknya ekosistem pesisir yaitu mangrove yang ada di Sumatera Barat menurut Laporan Pusat Kajian Mangrove dan Kawasan Pesisir – LPPM Universitas Bung Hatta telah mengalami kerusakan 25 – 50 % dari potensi mangrove yang ada. Sementara kondisi terumbu karang menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Universitas Bung Hattta telah mengalami kerusakan mencapai 75 % dari potensi terumbu karang yang di Sumatera Barat. Ekosistem padang lamun telah mulai terusik akibat tekanan kegiatan di darat maupun adanya pengurukan beberapa bagian wilayah pantai maupun penambangan pasir. Sementara ekosistem estuaria yang banyak terdapat disepanjang pantai Sumatera Barat telah terancam keberadaannya sehingga tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagai salah satu sumber penyalur nutrien sebagai bahan peningkatan produktifitas proudsen primer kawasan pesisir akibat pencemaran yang berasal dari daratan. Hal ini diakibatkan peningkatan kebun dan pabrik sawit, pabrik karet, pertanian, industri dan pemukiman disepanjang pantai. Penggunaan alat tangkap oleh nelayan maupun pengusaha di daerah dengan alat yang tidak direkomendasi telah beroperasinya puluhan alat tangkap jaring hamparan Dasar mulai dari Air Bangis Pasaman sampai Air Haji.

Berdasarkan data Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan telah terjadi kerusakan terumbu karang, padang lamun dan hutan mangrove yang cukup luas dan mempengaruhi habitat laut di wilayah administrasi Kabupaten Pesisir Selatan, hal tersebut dapat dilihat pada lampiran tabel.

Pengelolaan sumberdaya alam pesisir Sumatera Barat untuk mempertahankan kelestariannya mengalami permasalahan mendasar diantaranya pembuangan sampah/limbah terakhir. Masalah ini banyak dihadapi oleh negara berkembang dimana masyarakatnya belum menyadari akan keberadaan wilayah pesisir dan lautan. Menurut PSPK Bung Hatta, Sumatera Barat sepanjang pantai mulai dari Air Bangis Pasaman sampai dengan Ujung Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan telah dipenuhi sampah yang terurai dan tidak dapat terurai. Daerah pesisir merupakan wilayah padat penduduk. Hal ini mengakibatkan tekanan terhadap lingkungan pesisir sangat tinggi yang pada akhirnya beban wilayah pesisir tinggi dan menjadi stress pada akhirnya kelestarian sumberdaya alam akan terancam.

Kerusakan lahan tahun 2009 seluas 433.882,33 Ha sebagian besar disebabkan oleh lahan kritis dan penebangan liar. Lahan kritis yang terjadi secara alami sudah ada berpotensi dan ada yang bersumber dari aktifitas pembangunan ulah manusia, seperti penebangan kayu secara liar, kebakaran lahan dan hutan untuk perkebunan, pembangunan daerah permukiman, kegiatan penambangan batu bara tanpa recakling, perkebunan kelapa sawit dan banyak lagi yang lain. Kondisi lahan kritis daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2009 berada di Kecamatan Lengayang mencapai 63.812 ha atau 15 %, Kecamatan Lunang Silaut mencapai 54.383 ha atau 15 %, Kecamatan Linggo Sari Baganti 47.585 ha atau 13 %, luas lahan kritis terendah terdapat pada kecamatan Batang Kapas mencapai 13.687 ha atau 3 %,

Bayang mencapai 13.687 ha atau 3 % dan Bayang Utara mencapai 15.690 atau 4 %, untuk lebih jelas data lahan kritis dapat dilihat pada lampiran. Kebakaran lahan di Kabupaten Pesisir Selatan yang terjadi kurun waktu 2006-2009 seluas 3.760 ha yang pada umumnya disebabkan oleh pembukaan lahan baru untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1.9 berikut. Kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan kerusakan struktur tanah, infiltrasi, air tanah, akar tanaman tidak berkembang dan meningkatnya laju erosi tanah dan infiltrasi air tanah menurun.

Kawasan konservasi keanekaragaman hayati di Kabupaten Pesisir Selatan yang dikhususkan sebagai daerah kawasan perlindungan dan pelestarian adalah (1) Hutan Suaka Alam Margasatwa (HSAW) yang terletak dikecamatan Koto XI Tarusan dengan luas 45.722 ha, merupakan kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati terutama fauna yang unik sehingga dibutuhkan pembinaan habitatnya, dan (2) Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang berlokasi hamper diseluruh Kecamatan yang ada di KABUPATEN Pesisir Selatan, dengan luas 260.383 ha, merupakan kawasan pelestarian alam dengan ekosistem asli, system zonasi yang dimmanfaatkan untuk ilmu pengetahuan, budi daya dan pariwisata. Kabupaten Pesisir Selatan memanfaatkan dua kawasan ini sebagai tempat untuk penyelamatan dan pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati. Penyelamatan ini tidak hanya berada di dua kawasan tersebut tetapi jugaterdapat dikawasn produksi dan kawasan budi daya. Bentuknya seperti Hutan Produksi (HP), hutan Produksi konservasi (HPK), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL), areal perkebunan besar, penambangan dan hutan rakyat. Pulau Penyu yang terdapat di Kecamatan Sutea merupakan Suaka Marga Satwa di Sumatera Barat yang ditetapkan

berdasarkan Surat Usulan Penetapan Direktur Jenderal Hutan Pelestarian ALam No. 933/DJ/VI/PA/90 tanggal 26 Mei 1990.

Fluktuasi Keanekaragaman hayati Kabupaten Pesisir Selatan dilihat dari Jumlah spesies yang diketahui dan jumlah spesies yang dilindungi berdasarkan kategori hewan menyusui, burung, raptil, amphihi, ikan, keong, serangga dan tumbuhan, seperti dibawah ini dapat diketahui bahwa jenis spesies yang diketahui lebih banyak dari pada yang dilindungi, hal ini tentu saja terjadi karena kondisi hutan Kabupaten Pesisir Selatan banyak yang sudah dibabat sebagai tempat tinggal hewan tersebut. Flora yang mendominasi adalah spesies Burung dengan nilai 371 jenis, sedangkan flora adalah Tumbuh-tumbuhan dengan nilai 350 jenis. Jenis Spesies yang dilindungi didominasi oleh fauna seranggan sebanyak 20 jenis dan tumbuh-tumbuhan 45 jenis.

Jumlah spesies dominan yang diketahui pada daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah spesies burung dengan jumlah 371 spesies yang paling sedikit diketahui adalah spesies keong dengan jumlah 10 spesies. Seyogyanya yang dilindungi didominasi oleh spesies tumbuh-tumbuhan sebanyak 45 spesies dan Reptil sebanyak 31 spesies. Flora dan fauna kondisi sekarang sangat memprihatinkan banyak terjadi perambahan hutan, perburuan liar terhadap satwa yang mempunyai nilai ekonomis tinggi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak jenis spesies dilindungi yang keberadaannya langka dan endemic, salah satunya Harimau Sumatera. Pada tahun 2008 jumlah spesies yang diketahui secara keseluruhan pada daerah hutan TNKS hewan menyusui sebanyak 100 jenis, burung sebanyak 400 jenis. Hewan yang paling banyak jenisnya adalah burung dan paling sedikit jenisnya

keong. Pada tahun 2008 terjadi fluktuasi antara jenis spesies yang diketahui dengan yang dilindungi pada tahun 2009.

Sungai-sungai di Kabupaten Pesisir Selatan yang melewati pasar tradisional, pertanian, peternakan dan penambangan masih mengalami pencemaran namun tidak terlalu tinggi, karena sungai – sungai masih memiliki daya dukung dan daya tampung yang tinggi dan Sumber pencemaran yang masuk ke badan sungai seperti Limbah domestic, kotoran manusia, kegiatan pertanian oleh pupuk kimia dan kegiatan peternakan. Daerah sempadan sungai belum terkelola dengan baik. Dan meningkatnya debit air hulu dari tahun ke tahun pada beberapa batang sungai Salido dan Kambang, hal ini dapat mengkhawatirkan karena rendahnya resapan air di wilayah tersebut, untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran tabel. Kemiringan lahan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan berkisar antara 0% - 2% sampai dengan kemiringan > 40%. Kemiringan > **40%** yang merupakan kemiringan curam terdapat di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan luas **304.235 Ha (52,91%)**. Dengan kondisi geografis daerah tersebut, maka daerah Kabupaten Pesisir Selatan rawan terjadi bencana alam. Kebakaran lahan dan hutan sebagian besar disebabkan oleh pembukaan lahan perkebunan oleh pemilik perkebunan kelapa sawit sebagai upaya *lean clearing*. Sebagian lagi oleh masyarakat yang ingin berladang, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di daerah Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan Lunang Silaut dengan total luas 203, 5 ha. Bencana alam gempa bumi di Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal tanggal 30 September 2009 yang berpusat pada Kabupaten Padang Pariaman dengan kekuatan 7,8 SR dan gempa tahun 2007 telah menewaskan 13 orang dan kerugian diperkirakan Rp. 2.085.000.000,- dan meluluhlantakan sarana dan prasarana perkantoran,

perumahan penduduk, tempat ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sarana umum lainnya, dapat dilihat pada lampiran tabel.

Pesisir Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Wilayahnya mencakup daratan bagian selatan pulau Sumatera dan wilayah kepulauan, terletak pada posisi 0° 59' Lintang Selatan sampai dengan 2° 28,6' Lintang Selatan dan 0° 19'-101° 18' Bujur Timur. Luas kabupaten sebesar 574.989 Ha yang membentang dari utara ke selatan, dengan penggunaan lahan kawasan hutan 61 % dan kawasan budidaya 39% untuk lebih jelas dapat pada lampiran tabel dan lampiran gambar. Kabupaten Pesisir Selatan dengan panjang pantai lebih kurang 218 Km terdapat 342 kampung nelayan dengan 5.010 orang nelayan.

Budiharsono (1987) secara homogenitas wilayah pesisir merupakan wilayah yang memproduksi ikan, dengan tingkat pendapatan penduduknya di bawah garis kemiskinan ; sebagai wilayah nodal, wilayah pesisir merupakan wilayah belakang sedangkan daerah perkotaan sebai intinya dan juga sebagai halaman belakang (*backyard*) yang merupakan tempat pembuangan segala macam limbah ; sebagai wilayah belakang, wilayah pesisir merupakan penyedia input (pasar input) bagi inti dan merupakan pasar bagi barang-barang jadi (output) dari inti ; sebagai wilayah administrasi, wilayah pesisir dapat berupa wilayah administrasi yang relatif kecil yaitu kecamatan atau desa, namun juga dapat berupa kabupaten/kota pada kabupaten/kota yang berupa pulau kecil ; wilayah perencanaan lebih ditentukan dengan kriteria ekologis.

Darwanto (2000) wilayah pesisir di segala pelosok dunia dalam sejarahnya telah menjadi salah satu kawasan tempat eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran karena kandungan sumber daya alamnya yang kaya. Pemanfaatan sumber

daya pesisir yang intensif, optimal dan terkendali selain dapat mendorong adanya pertumbuhan ekonomi lokal yang tinggi juga dapat memberikan efek keuntungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat pesisir, yang ironisnya pada saat ini sebagian besar masih berada di bawah garis kemiskinan, adanya perbedaan kepentingan yang cenderung menjurus ke konflik kepentingan antar sektoral dan *stake-holders* lainnya, lemahnya kerangka hukum dalam hal pengaturan sumber daya pesisir dan lautan, serta perangkat hukum untuk penegakannya, masih minimnya keikutsertaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan.

Secara kasat mata keadaan wilayah pesisir pantai kumuh, tidak tertata, minim sarana prasarana dan rawan bencana alam, kondisi ini adalah bagian dari buruknya kondisi perumahan dan permukiman serta kurang baiknya sarana prasarana lingkungan terutama di kawasan permukiman nelayan tradisional. Kekayaan laut dan semua sumber daya yang terkandung di atas, permukaan, dan di dalamnya, tidak hanya kontradiksi dengan kemiskinan yang kasat mata, berdasarkan catatan statistik, Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kabupaten termiskin di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Pesisir Selatan telah terjadinya perubahan penggunaan lahan yang cukup signifikan, merupakan dampak dari perkembangan ekonomi dan penggunaan lahan baik dalam kabupaten maupun dengan kabupaten dan provinsi tetangga. Terjadinya konflik kepentingan antar sektor, seperti lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata, perikanan, pertambangan, prasarana wilayah dan sebagainya. Belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka penyesuaian, sinkronisasi dan memadukan berbagai rencana dan program sektor yang ada. Berbagai fenomena bencana yang terjadi di Kabupaten Pesisir

Selatan diantaranya badai, banjir bandang, dan longsor merupakan indikasi kuat terjadinya ketidakselarasan pemanfaatan ruang antara manusia dengan alam maupun antara kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Selain itu juga, ancaman bahaya tsunami yang harus dimitigasi secara dini dengan pengembangan jalur-jalur alternatif evakuasi dan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Konflik tersebut terjadi dalam pemenuhan kebutuhan pemenuhan kebutuhan tersebut berkaitan erat dengan bagaimana mengkonservasi stok kapital (Barier, 1993 : Makalah Falasafah, 2006;3) merinci tiga jenis kapital, yaitu: *man made capital (Km)*, *human capital (Kh)*, dan *natural capital (Kn)*. Menurut Perman (1996: Makalah Falasafah,2006;2), setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. *Pertama*, menyangkut **alasan moral**. Generasi kini yang menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumberdaya alam dan lingkungan memiliki kewajiban moral untuk menyisakan layanan sumberdaya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumberdaya alam yang merusak lingkungan sehingga menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama. *Kedua*, menyangkut **alasan ekologi**. Keanekaragaman hayati, misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi sehingga aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada hal yang mengancam fungsi ekologi tersebut. *Ketiga*, menyangkut **alasan ekonomi**. Alasan dari sisi ekonomi memang masih menjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria berkelanjutan. Dimensi ekonomi keberlanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran

kesejahteraan antargenerasi (*intergenerational welfare maximization*).

Menelaah kenyataan rendahnya produksi perikanan, tingginya angka kemiskinan, kerusakan ekosistem laut, kerusakan lahan, bencana alam dan menurunnya keanekaragaman hayati di wilayah pesisir Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan kelemahan daerah dalam mengelola sumber daya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan tersebut. Pengelolaan tersebut membutuhkan perencanaan pembangunan yang bisa memaksimalkan potensi sehingga pembangunan wilayah pesisir dengan mempertimbangkan keberlanjutan penggunaan sumberdaya alam untuk generasi yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik meneliti tentang bagaimana penjelasan ilmiah kondisi eksisting mengapa kehidupan nelayan tidak berkembang dan bagaimana perencanaan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah pesisir.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Kompleksitas perencanaan pembangunan penelitian ini dibatasi pada wilayah pesisir saja tetapi analisa penelitian tetap menelaah wilayah hulu dengan konsep pembangunan berkelanjutan dengan faktor-faktor volume dan nilai produksi ; kontribusi perikanan terhadap PDRB ; volume dan nilai ekspor ; nilai investasi ; penyerapan tenaga kerja perikanan ; rasio murid tamat SD ; angka kematian bayi ; angka harapan hidup ; proporsi air bersih perpipaan ; proporsi kawasan lindung, perubahan areal kualitas habitat penting, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kondisi eksisting wilayah pesisir dalam kerangka pembangunan berkelanjutan ?
2. Bagaimana perencanaan pembangunan sesuai kondisi eksisting tersebut dalam konteks berkelanjutan ?

### 1.3 Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Wilayah Pesisir Pada Kabupaten Pesisir Selatan, belum pernah dilakukan. Namun penelitian yang terkait dengan permasalahan yang akan di teliti pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya dapat di lihat pada berikut :

No	Nama Peneliti dan Judul Tesis	Tahun	Temuan Penting
1	<i>Sarwoko</i> <i>Mangkoedihardjo</i> , Perencanaan Tata Ruang Fitostruktur Wilayah Pesisir Sebagai Penyangga Perencanaan Tata Ruang Wilayah Daratan	2005	Tesis ini lebih cenderung mengkaji ekosistem daratan hingga muara sungai tapi tidak mengkaji secara keseluruhan wilayah yang terkait, tesis ini menghasilkan perencanaan yang mengacu kepada daerah aliran sungai di wilayah daratan hingga muara laut di wilayah pesisir . Konsekuensinya dalam kondisi tertentu diperlukan perencanaan tata ruang wilayah lintas batas wilayah administratif.
2	<i>Yessy Nurmalasari</i> , Analisis Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat	2001	Menganalisis sistem pengelolaan sumberdaya alam di suatu tempat dimana masyarakat lokal di tempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya. Serta strategi pengembangan masyarakat pantai dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu, yang bersifat struktural dan non struktural.
3	<i>A. Ari Dartoyo</i> , Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Berbasis Digital (SK : Kabupaten Cilacap Jawa Tengah)	2004	Menghasilkan : Dari aturan enterprise pengelolaan wilayah pesisir kabupaten, disusun sebuah diagram hubungan relasional antar entitas (ER) yang memperlihatkan hubungan antara hirarki administrasi wilayah kabupaten yang terdiri dari administrasi kabupaten pesisir, administrasi kecamatan pesisir dan administrasi desa/kelurahan pesisir dengan keanekaragam ekosistem pesisir yang ada di dalamnya. Masing-masing entitas merupakan basisdata dengan struktur isian tabel sesuai dengan kebutuhan untuk pengelolaan wilayah pesisir kabupaten. Relasional entitas (ER) akan memudahkan dalam penyusunan bahasa program yang menjelaskan realitas dunia nyata kedalam bahasa program.
4	<i>Yozki Wandri</i> , Analisis Pembangunan Perikanan Tangkap di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat	2005	Tesis berfokus analisa perkembangan tenaga kerja sub sektor perikanan di kecamatan pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, menganalisa status keberlanjutan sumberdaya ikan yyang dimanfaatkan oleh pukat pantai, payang, bagan, pancing tonda dan <i>mini trawl</i> . Kemudian

				merumuskan alternatif kebijakan yang harus dilakukan agar pembangunan perikanan tangkap Kabupaten Pesisir Selatan secara optimal serta tetap mempertimbangkan aspek kelestarian.
5	<i>Thamrin,</i>	Analisis	2007	Mengkaji tingkat keberlanjutan wilayah perbatasan sebagai salah satu program pengembangan agropolitan melalui analisa indeks dan status keberlanjutan wilayah perbatasan Kabupaten Bengkayang dari lima dimensi keberlanjutan. Analisa ini menggunakan metode <i>Multi Dimensional Scalling</i> (MDS) yang hasilnya dinyatakan dengan bentuk indeks dan status keberlanjutan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini merupakan penelitian tentang perencanaan pembangunan dengan berkelanjutan melalui penelaahan data-data sekunder dan data primer dengan 3 dimensi yaitu Dimensi Ekologi terdiri dari 10 atribut , Dimensi Ekonomi terdiri dari 9 atribut dan Dimensi Sosial Budaya terdiri dari 8 atribut. Kemudian melakukan Multi Dimensional Scalling untuk melihat keberlanjutan masing-masing atribut di masing-masing dimensi. Selanjutnya, membuat perencanaan pembangunan berkelanjutan untuk wilayah pesisir di Kabupaten Pesisir Selatan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan metode super impose peta dengan GIS atau AUTO-Cad, lokasi penelitian di Kabupaten Pesisir Selatan untuk semua sektor pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan pada wilayah pesisir.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada perumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisa secara ilmiah kondisi eksisting wilayah pesisir dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

2. Membuat perencanaan pembangunan berkelanjutan dalam membangun wilayah pesisir di Kabupaten Pesisir Selatan

#### 1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi peneliti, dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan dalam membuat perencanaan pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir ;
2. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terkait dengan penetapan keputusan dan perencanaan pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir yang multidisiplin ;
3. Sebagai masukan bagi pengambil keputusan di daerah bersangkutan untuk menentukan dan membuat perencanaan pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini secara spasial adalah Kabuapten Pesisir Selatan. Analisa ekonomi adalah Kecamatan IV Jurai, analisa berkelanjutan adalah deskripsikan dengan Metode Multi Dimensional Scalling untuk kondisi eksisting ekonomi, ekologi dan sosial serta metode super impose peta.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah sebagai berikut. BAB I Pendahuluan memuat tentang latar belakang, keaslian penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. BAB II Tinjauan Pustaka menguraikan tentang tinjauan

pustaka, landasan teori. BAB III Metodologi Penelitian menguraikan tentang metoda penelitian dan alat analisis yang digunakan. BAB IV Gambaran Umum Wilayah Hasil Penelitian menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan umum. BAB VI Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Wilayah Pesisir dan Bab VII Kesimpulan dan Saran memuat kesimpulan dan saran yang merupakan kesimpulan dari analisis data serta saran-saran atau rekomendasi untuk Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Wilayah Pesisir pada Kabupaten Pesisir Selatan.

## BAB VII

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 7.1 Kesimpulan

Setelah menganalisa secara ilmiah kondisi eksisting wilayah pesisir dalam konteks pembangunan berkelanjutan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir 12 indikator yaitu volume dan nilai produksi ; kontribusi perikanan terhadap PDRB ; volume dan nilai ekspor ; nilai investasi ; penyerapan tenaga kerja perikanan ; rasio murid tamat SD ; angka kematian bayi ; angka harapan hidup ; proporsi air bersih perpipaan ; proporsi kawasan lindung, perubahan areal kualitas habitat penting. Pada Kabupaten Pesisir Selatan denga status 3 berstatus baik, 8 berstatus kurang/tidak baik dan 1 berstatus stagnan. Sehingga pembangunan dengan indikator tersebut belum mencapai target yang ditetapkan menurut Agenda 21, *Millenium Development Goal's* dan *Integreted Coastal Zoning Management*. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 7.1**  
**Hasil Analisa Pembangunan Berkelanjutan Wilayah Pesisir**

Dimensi	Indikator	2004	2008	Target (Agenda 21, MDG's & ICZM)	Status
1. Ekonomi	- Volume dan nilai produksi	23.958,90 (ton) 59.797,60 (000 rp)	25.575,21 (ton) 281.327,31 (000 rp)	Meningkatnya volume dan nilai produksi	
	- Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	6,32 %	3,42 %	50%	Rendah (perlu usaha keras)
	- Volume dan nilai ekspor (dibandingkan dengan nilai ekspor propinsi)	22,81 %	15,03 %		Menurun dan tidak memiliki daya saing
	- Nilai investasi dalam bentuk kapal dan pabrik pengolahan	325	465		Meningkat tetapi tidak bertekhnologi tinggi
2. Sosial	- Penyerapan tenaga kerja perikanan dari jumlah angkatan kerja	7.907 (0,06%)	18.775 (0,12%)	30 %	Sangat rendah
	- Rasio Murid tamat	96,42 %	98,07 %	100 %	Berhasil

	SD				
	- Tingkat kesehatan Angka kematian bayi Angka harapan hidup pria Angka harapan hidup wanita	150/8.607 63,0 66,9	162/7.443 64,7 68,9	32/1000	Kematian bayi meningkat tapi angka kelahiran menurun
3. Ekologi	- Air Bersih Perpipaan	5,94%	5,98%	52,8 %	Perlu usaha keras
	- Proporsi kawasan lindung	Kawasan lindung : 64,03%	Kawasan lindung : 73,85 %		
	- Perubahan luas areal dan kualitas habitat penting perikanan	Terumbukarang 21,90%	Terumbukarang 20,81 %	100% (ICZM)	Buruk sekali

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan kondisi eksisting tersebut perencanaan pembangunan berkelanjutan dalam membangun wilayah pesisir di Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Mengutamakan peremajaan terumbu karang dan mangrove karena semakin baik terumbu karang maka populasi ikan semakin berkembang, selain itu membutuhkan waktu 10 tahun untuk penanaman terumbu karang dan 5 tahun untuk mangrove dewasa.
2. Meningkatkan pengawasan di kawasan lindung (terutama TNKS).
3. Sarana dan Prasarana, meliputi perencanaan dan penyediaan prasarana perikanan seperti pelabuhan, pabrik es, *cold storage*, infrastruktur pada sentra industri, pengadaan dan penyaluran sarana produksi (seperti BBM, benih, mesin dan alat tangkap), serta sistem informasi tentang teknologi baru dan sistem pengelolaan usaha yang efisien.
4. Produksi perikanan, meliputi usaha budidaya dan penangkapan yang menyangkut usaha perikanan skala kecil maupun besar.
5. Pengolahan hasil perikanan, meliputi kegiatan pengolahan sederhana yang dilakukan oleh petani dan nelayan tradisional hingga pengolahan dengan

teknologi maju di pabrik yang mencakup penanganan pasca panen sampai produk siap dipasarkan.

6. Pemasaran hasil perikanan, meliputi kegiatan distribusi dan pemasaran hasil perikanan atau olahannya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Termasuk pula di dalamnya kegiatan pemantauan distribusi informasi pasar (*market development*) dan pengembangan produk (*product development*).

## **7.2 Saran**

Dalam perencanaan umum yang senantiasa dibuat oleh stakeholder telah mempertimbangkan aspek lingkungan maupun ekologi, sehingga diperlukan perubahan yang mengacu pada pembangunan yang tidak hanya semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi namun dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan para pelaku pembangunan secara adil dan terpeliharanya daya dukung dan kualitas lingkungan secara seimbang untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan untuk anak cucu kita. Untuk itu perlunya suatu sistem pembangunan yang memuat 3 (tiga) dimensi pembangunan ekonomi sosial dan pembangunan lingkungan secara sekaligus. Untuk tahap pelaksanaan adalah dengan melakukan perubahan status berkelanjutan pada point 7.1 melalui peningkatan 8 (delapan) status yang tidak baik dan selanjutnya melaksanakan perencanaan yang telah dibuat melalui poses SWOT pada point 7.2